

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2006). Pembangunan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses yang dapat menciptakan pendapatan riil perkapita sebuah negara meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat, jumlah orang hidup di bawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Tarigan, 2007).

Ketimpangan, pemerataan, dan infrastruktur sebenarnya telah dikenal cukup lama di Indonesia, misalnya hal tersebut melatar belakangi program padat karya, berbagai pembangunan infrastruktur, seperti dalam program perbaikan kampung, perbaikan jalan, pos kampling, sungai, irigasi, listrik, telepon, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain (Hartono, 2008). Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. (Hartono, 2008). Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar

wilayah. Pendapatan per kapita rata-rata suatu daerah dapat disederhanakan menjadi Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan pendekatan konsumsi (Widiarto, 2001). Dalam pengukuran ketimpangan pembangunan ekonomi regional digunakan Indeks Williamson.

Masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Aldilla, 2011).

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh masing-masing orang, daerah satu dengan lainnya maupun negara satu dengan negara lainnya. Penting bagi kita untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah proses yang dapat menciptakan pendapatan riil perkapita sebuah Negara meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat, sejumlah orang hidup di bawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Tarigan, 2007).

Permasalahan ketimpangan pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, biasanya terjadi pada negara miskin dan berkembang. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi *demografi* (keadaan geografis dan keadaan penduduk) yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda (Zahara, 2014).

Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi ini ditimbulkan dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2000). Dampak negatif inilah yang menyebabkan ketimpangan yang tinggi menjadi salah satu masalah dalam pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan di suatu wilayah (Todaro, 2000).

Yuki Angelia (2010) melakukan penelitian tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi DKI Jakarta, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008 cenderung mengalami peningkatan. Penelitian ini juga menunjukkan

bahwa wilayah yang memiliki pertumbuhan relatif lambat adalah Kotamadya Jakarta Barat dan Kotamadya Jakarta Timur.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor (Widiarto, 2001).

Provinsi DKI Jakarta mengarahkan pembangunan daerahnya untuk menggali potensi yang ada guna mencapai pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi di berbagai daerah (Angelia, 2010). Dengan tingginya angkatan kerja di DKI Jakarta, dapat diartikan bahwa sedikitnya jumlah masyarakat miskin di daerah itu dan faktanya menurut data Badan Pusat Statistik, Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang paling kecil di Pulau Jawa dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Perkembangan penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Jawa seperti terlihat pada Tabel 1. Dari tabel 1 tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun penelitian, Provinsi DKI Jakarta mempunyai rata-rata persentase kemiskinan paling rendah di Pulau Jawa setelah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 3,73 persen dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Hal ini mengidentifikasi sedikitnya jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta

dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa tetapi tidak mengindikasikan pembangunan yang terjadi secara merata di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2009-2013 (Persen)

Provinsi	Tahun					Rata Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	
DKI Jakarta	3,62	3,48	3,75	3,70	4,09	3,73
Jawa Barat	11,96	11,27	10,65	9,98	9,18	10,59
Jawa Tengah	17,72	16,56	15,65	14,98	13,58	15,72
DI Yogyakarta	17,23	16,83	16,08	15,88	14,55	16,11
Jawa Timur	16,68	15,26	14,23	13,08	12,28	14,31
Banten	7,64	7,16	6,23	5,51	5,51	6,45

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan administrasi wilayah, secara administratif Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Provinsi, 44 Kecamatan, dan 267 Kelurahan dengan luas wilayah sebesar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), daerah yang memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi DKI Jakarta adalah Kotamadya Jakarta Timur yaitu 187,75 Km² dan daerah dengan luas wilayah paling kecil adalah Kepulauan seribu dengan luas 11,8 Km².

Karena Provinsi DKI Jakarta mempunyai persentase penduduk miskin yang paling rendah dan relatif tetap di antara provinsi lain di Pulau Jawa maka wajar bila Provinsi DKI Jakarta mempunyai PDRB per kapita yang tinggi dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Terlihat dalam Tabel 2, bahwa PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 sebesar Rp. 296.873.000 dan terus meningkat sampai pada tahun 2013 sebesar Rp. 315.757.000. Kotamadya Jakarta Barat menjadi daerah yang terkecil dalam memperoleh PDRB per kapita dalam tahun penelitian di antara kotamadya lainnya, yaitu sebesar Rp. 28.364.000.

**Tabel 2. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)**

Kotamadya	Tahun					Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	
Kepulauan Seribu	54,089	53,087	48,518	50,585	47,775	50,811
Jakarta Selatan	38,533	43,113	44,447	49,300	101,159	55,310
Jakarta Timur	25,689	24,844	24,231	27,334	47,673	29,954
Jakarta Pusat	106,605	114,431	97,901	110,647	54,690	96,855
Jakarta Barat	24,924	25,768	27,602	29,979	33,549	28,364
Jakarta Utara	47,032	44,601	45,473	50,296	30,910	43,662
DKI Jakarta	296,873	305,844	288,172	318,141	315,757	304,957

Sumber : Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan ekonomi Di Provinsi DKI Jakarta yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa DKI Jakarta sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi hal ini tidak serta merta mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di DKI Jakarta terjadi secara merata (Angelia 2010). Dapat dilihat bahwa rata rata PDRB per kapita di wilayah Kotamadya Jakarta Barat yang paling rendah dan jauh berbeda dengan PDRB per kapita di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan antara Kotamadya Jakarta Barat dan Kotamadya Jakarta Pusat

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan. Harapannya pada saat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat, akan mengurangi ketimpangan di dalam wilayah tersebut, akan tetapi pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan per kapita bagi seluruh masyarakat. Peningkatan serta tingginya pertumbuhan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta

Gambaran perkembangan pembangunan daerah tidak lepas dari perkembangan jumlah angkatan kerja antar daerah. Provinsi DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian Indonesia dan merupakan daerah tujuan para pencari kerja dari berbagai daerah. Maka dari itu diperlukan juga campur tangan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu penelitian ini memfokuskan hanya kepada pengaruh tenaga kerja, pengangguran dan kemiskinan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah angkatan kerja yang ada dalam suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan. Dengan adanya angkatan kerja yang meningkat berarti ada kenaikan kegiatan ekonomi dan tingkat kemakmuran, sehingga ketimpangan mengalami penurunan (Angelia, 2010).

Berikut tabel yang memperlihatkan data ketenagakerjaan selama 5 tahun (2009-2013) di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3. Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2013 (Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk	Tenaga Kerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
2009	8.523.157	4.118.390	569.337	4.687.727
2010	9.607.787	4.689.761	582.843	5.272.604
2011	9.752.144	4.588.418	555.408	5.143.826
2012	9.869.138	4.838.596	529.976	5.368.572
2013	9.969.948	4.712.836	467.178	5.180.014

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 3, menunjukkan penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 berjumlah 8.523.157 jiwa terdiri dari 4.687.727 jiwa angkatan kerja, sedangkan tenaga kerja yang terserap hanya berjumlah 4.118.390 jiwa, sehingga tingkat pengangguran yang terjadi berjumlah 569.337 jiwa, dan pada Tahun 2013 jumlah penduduk berjumlah 9.969.948 jiwa terdiri dari 5.180.014 jiwa angkatan kerja, sedangkan

tenaga kerja yang terserap hanya berjumlah 4.712.836 jiwa, sehingga tingkat pengangguran yang terjadi berjumlah 467.178 jiwa. Tenaga Kerja terus mengalami peningkatan dari Tahun 2009 yang berjumlah 4.118.390 jiwa sampai dengan tahun 2013 dengan tenaga kerja sebesar 4.712.836 jiwa begitu pula dengan angka pengangguran di DKI Jakarta yang terus meningkat. Di sisi lain gelombang pencari kerja juga mengalir mengejar kesempatan bekerja dari kota-kota lainnya ke daerah DKI Jakarta yang kaya potensi. Hal ini menjadi masalah kepadatan penduduk bagi daerah yang menerima pencari kerja dari daerah-daerah miskin ke kota besar. Karena itu di kota-kota besar relatif banyak golongan ekonomi lemah dari penduduk asli ataupun dari daerah-daerah lain yang dapat mengakibatkan saling berebut tempat dan peluang antar kelompok daerah asal (Munir, 2003).

Provinsi DKI Jakarta mengarahkan pembangunan daerahnya untuk menggali potensi yang ada guna mencapai pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi di berbagai daerah (Angelia, 2010). Dengan tingginya angkatan kerja di DKI Jakarta, dapat diartikan bahwa sedikitnya jumlah masyarakat miskin di daerah itu dan faktanya menurut data Badan Pusat Statistik, Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif kecil dari tahun 2009 sampai tahun 2013

Tabel 4. Kondisi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Kependudukan		
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Miskin (Jiwa)	Penduduk Miskin (Dalam Persen)
2009	8.523.157	323.880	3,80
2010	9.607.787	388.145	4,04
2011	9.752.144	355.000	3,64
2012	9.869.138	365.158	3,70
2013	9.969.948	370.882	3,72

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perkembangan penduduk miskin menurut tahun di wilayah Provinsi DKI Jakarta seperti terlihat pada Tabel 4. Dari tabel 4 diatas memperlihatkan bahwa tahun 2011 mempunyai persentase kemiskinan yang paling rendah dengan 3,64 persen dan yang paling tinggi persentase penduduk miskinnya adalah tahun 2010 dengan 4,04 persen. Hal ini mengidentifikasikan masih adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan berdasarkan sensus penduduk tahun 2013 yaitu sekitar 9,96 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu maka seharusnya dapat membantu pembangunan dengan pendapatan per kapitanya, akan tetapi jika tidak diberdayakan maka hanya akan menambah beban pembangunan.

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009-2013”** untuk menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di DKI Jakarta dan pengaruh variabel tenaga kerja, pengangguran, dan penduduk miskin di DKI Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah pada analisis tentang :

1. Bagaimana kondisi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2013?
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2013.
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2013.
4. Bagaimana pengaruh penduduk miskin terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2013.

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kondisi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun tahun 2009-2013?
- b. Mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2013.
- c. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2013.
- d. Mengetahui pengaruh penduduk miskin terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2013.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada :

1. Sebagai Syarat untuk memperoleh gelar sarjana Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

2. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan wilayah, sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembangunan ekonomi ini.

3. Ilmu Pengetahuan

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan dan ekonomi perencanaan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian ketimpangan wilayah dengan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhinya.

E. Kerangka Penelitian

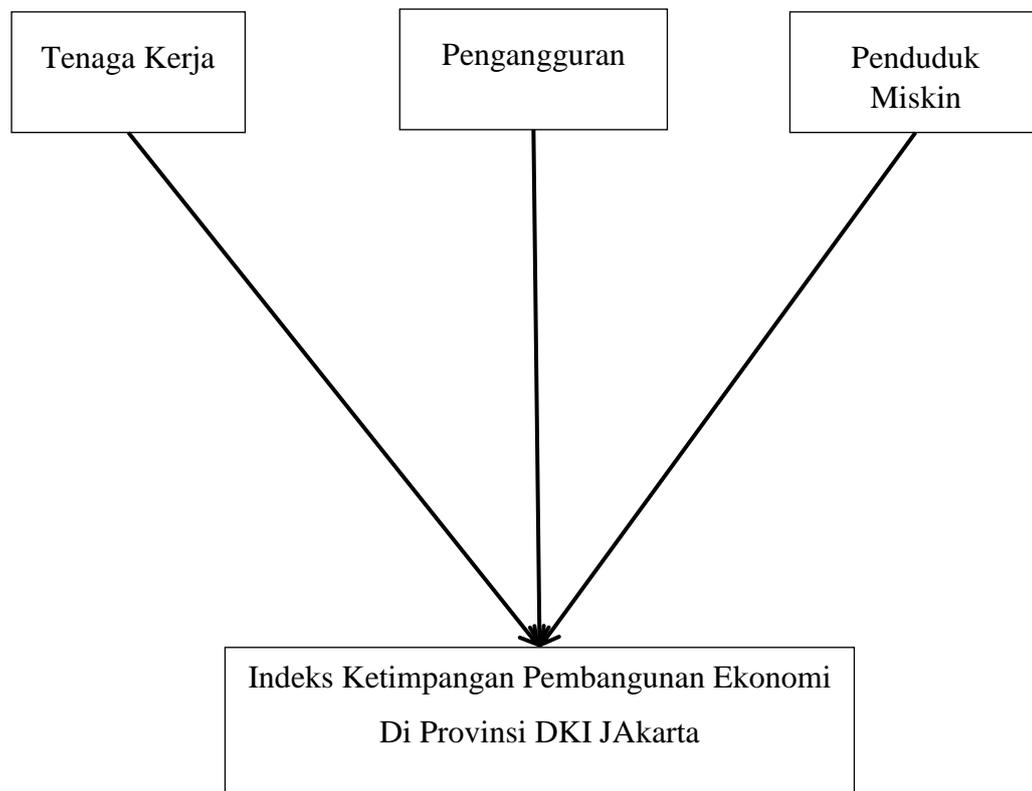
Masalah ketimpangan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan wilayah juga merupakan masalah yang belum dapat dihapuskan pada di Indonesia. Di Indonesia sebagai negara sedang berkembang, tingkat ketimpangan wilayahnya termasuk tinggi salah satunya terdapat di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Angela 2010).

Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah yang bersangkutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan PDRB khususnya PDRB per kapita pada suatu wilayah. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka diharapkan tercipta masyarakat yang sejahtera dan mengurangi ketimpangan. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pendapatan per kapita pada suatu wilayah sudah merata di seluruh lapisan masyarakat atau tidak. Jumlah tenaga kerja yang ada dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan. Tenaga kerja yang meningkat berarti ada kenaikan kegiatan ekonomi dan tingkat kemakmuran, sehingga ketimpangan mengalami penurunan. Dibukanya lapangan kerja baru tentu akan menyerap tenaga kerja baru sehingga jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan. Adanya penyerapan tenaga kerja ini yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan

daya beli masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa lebih besar yang kemudian mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak lagi dan seterusnya, dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik dan ketimpangan ekonomi akan menurun.

Pertumbuhan ekonomi yang merata menjadi indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat diharapkan pertumbuhan tersebut dapat dinikmati merata oleh seluruh masyarakat.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah, maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diduga variabel tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 – 2013
- b. Diduga variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 – 2013
- c. Diduga variabel penduduk miskin berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 – 2013